

Tema : Pengembangan Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai  
Sub Tema : Pengembangan Model atau Kebijakan Terkait dengan Pengembangan Wilayah Pesisir

**USULAN PENELITIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**SKEMA PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS RIAU**



**MODEL KEBIJAKAN PERTAHANAN-KEAMANAN-INTELIJEN**  
**(DI KAWASAN PESISIR RIAU PERBATASAN INTERNASIONAL)**

**TIM PENELITIAN**

KETUA	: MUCHID, S.Sos M.Phil, PhD	NIDN : 0017076803
ANGGOTA	: MIMIN SUNDARI NASUTION, M.Si	NIDN : 0018068502
ANGGOTA	: ADLIN, S.Sos, M.Si	NIDN : 0008028104
ANGGOTA	: ISMANDIANTO, S.Sos, M.Kom	NIDN : 8827420016
MAHASISWA	: ROSYIDA DARMAN	NIM : 1501121496
MAHASISWA	: HAVIS AL RAFI	NIM : 1401119383

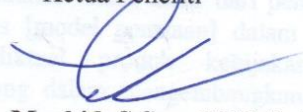
**SUMBER DANA: DIPA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2020**

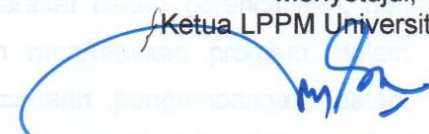
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**PEKANBARU, MARET 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Model Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen (di Kawasan Pesisir Riau Perbatasan Internasional)
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap: MUCHID, S.Sos., M. Phil., PhD
  - b. Jenis Kelamin : Laki - laki
  - c. NIDN : 0017076803
  - d. Jabatan Struktural : -
  - e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan
  - g. Alamat Kantor : Kampus Bina Widya Km.12,5 Panam, P.Baru
  - h. Tlp /Fax : (0761)63277
  - i. Alamat Rumah : Jl. Kopan Gobah - Pekanbaru
  - j. Hp/Telp/Email : 08127643807/muchid@lecturer.unri.ac.id
3. Anggota 1  
Nama Lengkap: : Mimin Sundari, S.Sos, M.Si
  - a. Jabatan Fungsional : Lektor
  - b. NIDN : 0018068502
4. Anggota 2
  - a. Nama Lengkap: : Adlin, S.Sos, M.Si
  - b. Jabatan Fungsional : Lektor
  - c. NIDN : 0008028104
5. Anggota 3 :
  - d. Nama Lengkap: : Ismandianto, S.I.Kom, M.I.Kom
  - e. Jabatan Fungsional : Assisten Ahli
  - f. NIDN : 8827420016
6. Anggota 4
  - a. Nama Lengkap : ROSYIDA DARMAN
  - c. NIM : 1501121496
7. Anggota 5
  - a. Nama Lengkap: : HAVIS AL RAFI
  - b. NIM : 1401119383
8. Jangka Waktu Penelitian : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
9. Pembiayaan :
  - a. Dana Diusulkan/Disetujui : Rp. 50.000.000,-
  - b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Mengetahui,  
Dekan FISIP Universitas Riau  
  
**Dr. Syafri Harto, M.Si**  
NIP. 196709131993031002

Pekanbaru, 14 Maret 2020  
Ketua Peneliti  
  
**Muchid, S.Sos., M.Phil., PhD**  
NIP. 196807172000031001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Riau,  
  
**Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE, MP**  
NIP. 19600822 199002 1002

## **RINGKASAN RENCANA PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan tahap pertama [ke-1] sebagai formulasi Model Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Intelijen [Pertahanan-Keamanan-Intelijen/Han-Kam-Jen] di Kawasan Riau Pesisir Perbatasan Strategis Internasional meliputi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Penelitian tahap pertama ini berupaya menelaah ragam kebijakan pemerintah pusat-daerah [negara] yang berhubungan dengan masalah pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan Riau pesisir perbatasan strategis internasional. Sebagai urusan mutlak pemerintah pusat, masalah Han-Kam-Jen, telaahan dimaksudkan berupaya mengidentifikasi [mengumpulkan, memetakan, menjelaskan] kendala dan strategi [model formulasi kebijakan] sebagai dampak kekosongan regulasi wilayah perbatasan negara, konflik kewenangan antara pemerintah pusat-daerah, kebijakan pembangunan di perbatasan yang ambigu [rerata kebijakan yang dikeluarkan saling tumpang-tindih, tidak saling mendukung terkait pembangunan di kawasan perbatasan], pembiaran pelanggaran wilayah, dan alat penangkapan ikan, potensi penyelundupan narkoba masalah batas negara yang belum menjadi perhatian utama dan keberadaan institusi pengelola perbatasan Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan [1] Mengidentifikasi, dan menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan bidang pertahanan, keamanan dan intelijen [konflikasi perbatasan wilayah negara] di kawasan Riau pesisir perbatasan strategis internasional. [2] Mengidentifikasi, menelaah, menjelaskan formulasi [merumuskan] model kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan Riau pesisir perbatasan strategis internasional. Studi ini menggunakan Politik Kewenangan dan Politik Desentralisasi, ditambah beberapa konsep yang mendukung sebagai kerangka teoritisnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan berdasarkan dokumen yang didukung wawancara. Setelah terkumpul, data dianalisis secara kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini direncanakan menemukan formulasi strategis [model penataan: identifikasi, evaluasi dan formulasi] dalam kerangka mengantisipasi, dan meminimalisir konflik produk kebijakan terkait bidang pertahanan, keamanan, dan intelijen [konflikasi batas wilayah negara] di kawasan Riau pesisir perbatasan internasional sebagai role model pemerintah pusat menata regulasi di perbatasan wilayah negara.

## **IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN**

### **1. Ketua Tim**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : MUCHID, S.Sos., M.Phil., PhD          |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki- Laki                            |
| c. NIP / NIDN               | : 196807172000031001 / 0024058304       |
| d. Golongan/Pangkat/jabatan | : IVb / Pembina/ Lektor Kepala          |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Pemerintahan                     |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Ekonomi Politik Hukum                 |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 10 Jam / Minggu                       |

### **2. Anggota 1**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : MIMIN SUNDARI , S.Sos, M.Si           |
| b. Jenis Kelamin            | : Perempuan                             |
| c. NIP / NIDN               | : 0008028104                            |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : IIIc / Penata / Lektor                |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Pemerintahan                     |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Kebijakan Pemerintah                  |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 8 Jam / Minggu                        |

### **3. Anggota 2**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : ADLIN, S.Sos, M.Si                    |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki-Laki                             |
| c. NIP / NIDN               | : 198305242008122001/001806502          |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : IIIc / Penata / Lektor                |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Administrasi Negara              |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Administrasi Pembangunan              |
| Waktu untuk pembinaan       | : 8 Jam / Minggu                        |

### **4. Anggota 3**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Lengkap             | : ISMANDIANTO, S.I.Kom, M.I.Kom         |
| b. Jenis Kelamin            | : Laki-laki                             |
| c. NIP / NIDN               | : 8827420016                            |
| d. Golongan/Pangkat/Jabatan | : Asisten Ahli                          |
| e. Disiplin Ilmu            | : Ilmu Komunikasi                       |
| f. Fakultas                 | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| g. Perguruan tinggi         | : Universitas Riau                      |
| h. Bidang Keahlian          | : Komunikasi Organisasi                 |
| i. Waktu untuk pembinaan    | : 10 Jam / Minggu                       |

**Anggota 4 (Mahasiswa)**

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| a. Nama Lengkap  | : ROSYIDA DARMAN         |
| b. Jenis Kelamin | : Perempuan              |
| c. NIM           | : 1501121496             |
| d. Prodi         | : Ilmu Komunikasi / UNRI |

**Anggota 5 (Mahasiswa)**

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| a. Nama Lengkap  | : HAVIS AL RAFI            |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-Laki                |
| c. NIM           | : 1401119383               |
| d. Prodi         | : Ilmu Pemerintahan / UNRI |

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan  
Ringkasan Rencana Penelitian  
Identitas Anggota Kegiatan Penelitian

### Daftar Isi

A.	LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B.	PERUMUSAN MASALAH	5
C.	MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	5
D.	LUARAN/ MANFAAT PENELITIAN	6
E.	TINJAUAN PUSTAKA	7
	1. Penelitian Terdahulu	8
	2. Kerangka Teori	9
	3. Kerangka Konsep	16
	4. Kerangka Pemikiran	19
	5. Definisi Konseptual	20
F.	METODE PENELITIAN	21
	1. Pendekatan dan Alur Penelitian	
	2. Ruang Lingkup, Lokasi dan Waktu	21
	3. Jenis dan Sumber Data	23
	4. Teknik Pengumpulan Data	26
	5. Teknik Analisis Data	26
	6. Roadmap Penelitian	27
G.	JADWAL KEGIATAN	29
H.	REKAPITULASI BIAYA	29
I.	SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM	30
J.	JUSTIFIKASI ANGGARAN	31

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Penelitian ini berupaya menelaah ragam regulasi di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen [Pertahanan-Keamanan-Intelijen] di kawasan pesisir perbatasan internasional yang dinilai strategis. Kawasan pesisir perbatasan strategis yang dimaksud adalah yang terdapat di Riau Pesisir, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Telaahan dimaksudkan sebagai upaya mengidentifikasi, memetakan dan memformulasikan berbagai ragam kebijakan pemerintah pusat-daerah [negara] di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen. Dalam konteks studi akademis penelitian ini bagian dari studi kebijakan yang dihubungkan dengan ragam regulasi urusan bidang pertahanan, kemanana dan intelijen yang diselenggarakan negara di kawasan pesisir perbatasan strategis internasional.

Studi kebijakan di kawasan pesisir perbatasan [batas wilayah negara] menjadi penting oleh karena dalam banyak regulasi pemerinah pusat selalu mengintervensi intervensi langsung [urusan Pertahanan dan Keamanan termasuk urusan mutlak menjadi otoritas pemerintah pusat]. Namun, dalam konteks ini di bidang pertahanan, kemaman, dan intelijen dinilai masih sangat minim dilakukan. Studi ini, tidak berupaya melakukan perbandingan di 2 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Riau, melainkan menempatkan persoalan kewenangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah menjadi fokus kajiannya sejalan dengan kewenangan desentralisasi asimetris terkait urusan mutlak.

Sementara untuk konteks beragam regulasi, secara substansi dalam pemahaman desentralisasi asimetris kawasan perbatasan dinilai perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas kedaulatan-wilayah negara [pertahanan-keamanan-intelijen] yang terintegrasi. Kawasan perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi, yang daerah perbatasan juga harus menjadi halaman depan negara. Citra sebagai halaman depan negara yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan.

Sebagai kawasan strategis yang letaknya diperbatasan, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, persoalan pertahanan, keamanan, dan intelijen menjadi isu utama yang selalu diperbincangkan pada konteks aktualitas-kekinian.

Studi ini menjadi penting dijelaskan terkait ragam kebijakan bidang pertahanan, keamanan dan intelijen kawasan pesisir perbatasan internasional pada ketiga kawasan tersebut sebagai kawasan studi. Paling tidak terdapat beberapa argumentasi yang mendukungnya. [1] kabupaten Rokan Hilir [Rohil], salah satu kawasan ada yang tidak dapat diakses melalui jalan darat, padahal letaknya masih di pulau Sumatera. Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat kecamatan terluar yang potensial dikembangkan menjadi kawasan wisata dan kerjasama internasional [rencana jembatan Dumai-Melaka, atau Roro Dumai-Melaka]

[2]. Rokan Hilir atau Palika [Kecamatan Pasir Limau Kapas], merupakan kecamatan di Provinsi Riau yang terjadi konflik perbatasan secara langsung dengan negara tetangga, Malaysia dan Provinsi tetangga Sumatera Utara. [3]. Palika maupun belum menjadi skala prioritas pengembangan perbatasan sesuai RJPMD



Rokan Hilir. [4]. Badan Pengelola Perbatasan [BPP] yang ada telah dilikuidasi tahun 2016, setelah didirikan tahun 2014, sebagai dampak peraturan pemerintah tentang perangkat daerah.

Berbagai alasan ini mendukung secara akademis jika studi ini dapat berkontribusi, [1]. Menciptakan pemerataan kajian kawasan pesisir perbatasan strategis yang terkait studi politik kewenangan [berhubungan ragam kebijakan yang terfokus pada bidang pertahanan, keamanan dan intelijen yang saling terintegrasi], tanpa membandingkan ketiga kabupaten di Provinsi Riau. [2]. Mempekaya kajian yang tidak hanya tertumpu di perbatasan pada persoalan ekonomi, kemasyarakatan, konflik sosial budaya, potensi sumber daya, tetapi lebih pada antisipasi dalam kerangka menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara yang belum seimbang antar kawasan perbatasan. [3]. Dapat menjadi sumber informasi dalam kerangka mengkaji ulang ragam kebijakan di kawasan perbatasan internasional yang dinilai strategis yang mana regulasi tentang wilayah batas negara masih menjadi persoalan utama yang sedang dihadapi.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan menjadi penting penelitian tentang Model Kebijakan Kawasan Pesisir Perbatasan Strategis internasional di Provinsi Riau dilakukan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berpedoman pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi pemerintah pusat [negara] dalam merumuskan dan mengevaluasi, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan dan intelijen kawasan pesisir perbatasan strategis internasional?
2. Bagaimana strategi pemerintah pusat merumuskan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir Riau perbatasan strategis internasional?

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan penelitian tentang mengidentifikasi, memetakan dan memformulasikan ragam kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen ini adalah sebagai berikut:

[1] Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan bidang pertahanan, keamanan dan intelijen sebagai kawasan pesisir perbatasan strategis internasional di Provinsi Riau.

[2] Mengidentifikasi, menelaah, menjelaskan formulasi [merumuskan] model kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan strategis internasional di Provinsi Riau.

#### **D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat/luaran penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis Teoritis**

Secara akademis teoritis hasil penelitian ini bermanfaat memperkaya dan memperdalam studi dalam pengintegrasian bidang pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan utamanya yang strategis, tidak saja secara nasional, tetapi juga internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat membantu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan wilayah administratif daerah Kecamatan di tiga kabupaten di Provinsi Riau dalam mengusulkan, menetapkan dan memformulasikan kebijakan yang terintegrasi terkait pertahanan, keamanan dan inteleijen di kawasan pesisir perbatasan strategis internasional.

Adapun yang menjadi luaran dari penelitian ini adalah: [1]. Laporan akhir. [2]. Hasil penelitian akan dipublikasikan dalam jurnal bertaraf internasional terindeks scopus. [3] Hasil peenlitian akan didaftar sebagai kekayaan intelektual [4]. Ringkasan eksekutif. [5]. Membuat model kebijakan [formulasi kebijakan]. [6]. Membantu tugas akhir mahasiswa [draf skripsi].

**Tabel. 1**  
**Rencana capaian/output penelitian**

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Laporan akhir	√
2.	Artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus [bukti jawaban resmi tertulis penerbit]	√
3.	Kekayaan Intelektual dengan status terdaftar	√
4.	Ringasan eksekutif disertai gambar	√
5.	Membuat model kebijakan [sebagai formulasi kebijakan]	√
6.	Referensi tugas akhir mahasiswa [draf skripsi]	√

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan berdasarkan pada kerangka teoritis sesuai yang dirumuskan, dan menjelaskan tujuan penelitian. Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan tentang; [1]Tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding, dan pembeda terhadap pentingnya penelitian ini, [2] Kerangka Teori; [3] Kerangka Konsep, [4] Kerangka Pemikiran dan [5] Definisi Operasional.

### **1. Penjelasan Studi Terdahulu**

Dalam berbagai studi tentang pengembangan, strategi atau formulasi kebijakan kawasan pesisir perbatasan khususnya pada daerah yang dinilai strategis baik nasional dan internasional [termasuk pada studi ini], perlu mendapat perhatian yang serius, terfokus, dan terintegrasi. Dengan demikian studi ini menjadi bagian integral

berkontribusi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Walaupun begitu kajian lainnya perlu diungkap sebagai pembanding terkait esensi penting di mana posisi studi ini yang nantinya dinilai dapat menjadi novelty [kebaruan].

Berhubungan dengan studi ini,

[1]. Studi Juita Carolina Lesawengen (Lesawengen, 2016), Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe Berbasis Ekowisata Bahari. [2]. Studi Gevisioner, Rindukasih Bangun dan Karyanti (2013), “Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau.” [3]. Studi Enni Lindia Mayona, Salahudin, dan Rahmi Kusmastuti (2011), “Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat.” [4]. Studi Heri Apriyanto (2009), “Analisis Strategi Kawasan Pengembangan Ekonomi [KPE] Bagansiapi-api Provinsi Riau.” [5]. Studi Muhammad Haris Zulkarnain dan Kholis Roisah (2018), “Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia.” [6]. Studi Muradi (2015). “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan.” [7]. Sudirman, Arfin dan Achmad Fadly (2018). “Perluakah Reformasi Sektor Intelijen di Tubuh Pertahanan Indonesia?”

Berdasarkan pada ketujuh studi tersebut, maka penelitian ini memfokuskan telaahannya pada dua hal, pertama, terintegrasinya kewenangan antar kelembagaan pemerintah pusat yang didukung pemerintahan daerah dalam memformulasikan dan menetapkan kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen kawasan pesisir perbatasan

strategis internasional. Kedua, sebagai konsekwensi terintergasinya kewenangan antara kelembagaan pemerinathan pusat di kawasan pesisir perbatasan berdasarkan kebijakan Desentralisasi Asimetris [resentralisasi, bukan desentralisasi]. Berbanding studi lainnya, perlu dikemukakan beberapa alasan yang membedakan secara signifikan dalam studi ini.

[1]. Belum atau bahkan hampir tidak ada studi yang memfoukuskan kajiannya terkait pertahanan, keamanan, dan intelijen yang saling terkait dan terintegrasi di kawasan pesisir perbatasan yang strategis khususnya di Pantai Timur Pesisir Sumatera [sejauh ini studi kebanyakan kawasan perbatasan darat Kalimantan, Sabang dan Aceh].

[2] Bidang yang dikaji dalam aspek formulasi ragam kebijakan di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir strategis internasional, Palika dan Pulau Laut terkesan belum mendapat tempat secara poporsional baik dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Lebih lanjut studi sebagai dampak akibat konflikasi kewenangan antara pusat-lokal dalam memfrmulasi ragam kebijakan pengembangan kawasan pesisir perbatasan strategis belum terakomodir secara konseptual-akademis, dan praktis-kebijakan.

[3]. Pengalaman lepasnya Pulau Simpadan dan Ligitan ke pemerintah Malaysia ‘memperjelas memunculkan asumsi ketidakpedulian negara’ [pemerintah pusat dan daerah], mengelola dan mempertahankan kedaulatan pulau-pulau terluar di perbatasan teristimewa yang strategis secara internasional.

## **2. Kerangka Teori**

Untuk memudahkan pentingnya menelaah strategi pengembangan kawasan dan daerah strategis internasional serta hubungan keduanya dapat dijelaskan secara teoritis. Penting untuk disampaikan bahwa konteks penggunaan kerangka teori merupakan upaya awal [secara teoris] memahami arti penting hubungan antara kendala merumuskan dan menetapkan, strategi [tahapan langkah atau model formulasi kebijakan] terhadap ragam kebijakan berhubungan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan dan kawasan strategis internasional tersebut perlu dijelaskan.

### **2.1 Politik Desentralisasi**

Secara umum berdasarkan teori [pendekatan] desentralisasi dikenal dengan istilah Desentralisasi Asimetris. Pada kenyataannya di Indonesia saat ini memiliki tiga contoh desentralisasi asimetris, seperti Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua, dan Otonomi Khusus [Daerah Istimewa] Yogyakarta. Model desentralisasi ini memiliki perbedaan dengan desentralisasi yang diatur berdasarkan berbagai undang-undang tentang pemerintahan di daerah (Ahmad Nurmandi, Trsino Aji dan Nicolas Panama 2012).

Mengulas dan mencermati Desentralisasi Asimetris sebagai bagian dari politik [kebijakan] pemerintah di bidang desentralisasi, khusus pasca Orde Baru, memberikan jastifikasi terjadinya resentralisasi halus dan terstruktur tak dapat dibantah. Walaupun begitu, dalam konteks studi ini paling tidak memerlukan

jastifikasi sebagai pendukung jika Desentralisasi Asimetris adalah sebuah kebijakan keniscayaan membangun keharmonisan [harmonisasi] hubungan pusat-daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh JPP Fisipol UGM (JPP-UGM 2010) misalnya, menunjukkan lima alasan mengapa Desentralisasi Asimetris harus atau (kalau boleh menjadi sebuah keniscayaan) dilakukan di Indonesia. Pertama, alasan konflik dan tuntutan separatisme. Realitas dua daerah [tiga Provinsi] yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus karena konflik antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional yang antara lain karena perebutan sumber daya.

Kedua, alasan ibukota negara. Perlakuan khusus ini hanya diberikan untuk Provinsi DKI. Mengingat DKI yang wilayahnya terjangkau dengan infrastuktur terbaik di negeri ini, perlakuan khusus diwujudkan dalam ketiadaan pemilukada untuk Bupati/Walikota dan tidak ada DPRD Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur.

Ketiga, alasan sejarah dan budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan perlakuan istimewa mengingat sejarahnya di masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. Perlakuan ini terlihat dari penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY yang dilakukan oleh DPRD. Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur DIY adalah Pakualam yang bertahta. Penentuan Sultan dan Pakualam diserahkan kepada institusi keratin/pakualam masing-masing. Kedua pemimpin ini tidak boleh bergabung dengan partai politik. Pada level kabupaten/kota tetap sama dengan daerah lainnya.



Keempat, alasan perbatasan. Terkait dengan studi ini, menurut Tim JPP (JPP-UGM 2010), perbatasan perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus diperlakukan sebagai halaman depan dan bukan halaman belakang RI.

Kelima, pusat pengembangan ekonomi. Daerah yang secara geografis memiliki peluang untuk menjadi daerah khusus ekonomi, idealnya dikembangkan agar memiliki daya saing ekonomi tinggi. Daerah seperti Batam [kota Batam], dalam konteks kajian ini adalah realitas penerapan Desentralisasi Asimetris. Hanya saja diakui atau tidak, Batam adalah representasi ‘kegagalan’ pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Asimetris yang sudah berlangsung lama (Albintani 2016).

## 2.2 Politik Kewenangan: pengertian, sifat dan sumber

Pengertian kewenangan secara umum sudah difahami yang juga yang selalu disebut kekuasaan formal. Kekuasaan ini berasal dari legislatif [diberikan oleh undang-undang], atau dari eksekutif- administratif. Oleh karena ini kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu, atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ [institusi] pemerintahan [pemerintah pusat-negara] dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi [UUD]. Pada kewenangan delegasi,

harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator [pemberi mandat].

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada [konstitusi]), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan begitu pejabat [organ] dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ [institusi] pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ [institusi] pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Sementara itu, sifat kewenangan pemerintahan bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Ini terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan, dan penerbitan keputusan-keputusan [*besluiten*], dan ketetapan [*beschikkingen*] oleh organ pemerintahan. Realitas ini dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Sedangkan sumber kewenangan di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya, dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama.

Terkait dengan penjelasan ini, misalnya. Hadjon (2014), mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi,

mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya diikuti pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat dalam hal ini, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa, dan pegawai [tidak adanya pemindahan tanggung jawab, atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat]. Perlu diperjelas bahwa setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu.

### 2.3 Politik Kewenangan: Pertahanan-keamanan-intelijen di Perbatasan

Dalam referensi baik ilmu politik, pemerintahan, hukum tak jarang ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan. Lebih dari itu, kekuasaan juga dimaknai atau bahkan dipertukarkan dengan istilah kewenangan dan sebaliknya. Tidak jarang pula kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Dari sini dapat diargumentasikan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa , “ada satu pihak yang memerintah, dan pihak lain yang diperintah”

Berdasarkan argumentasi ini, maka secara normatif [teoritis], dan praktis [praktik di lapangan], dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan sama sekali dengan hukum. Ini misalnya saja, terkait kekuasaan yang tidak berkaitan dengan

hukum sering diistilahkan sebagai 'blote match'. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum, Max Weber, misalnya menyebut sebagai wewenang rasional atau legal. Wewenang ini berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat.

Harus dipahami juga bahwa kekuasaan, pada praktisnya merupakan inti dari penyelenggaraan Negara. Ini dimaksudkan, agar negara dalam keadaan bergerak [dinamis], sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Bersandar pada kekuasaan ini pula, jika ditilik dari Miriam Budiardjo (2016), yang mendefinisikan kekuasaan adalah kemampuan seseorang, atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang, atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Mencermati apa yang dimaksud kekuasaan, maka agar kekuasaan dapat dijalankan tentu saja dibutuhkan penguasa, atau organ. Ini lebih konkrit dimaksud bahwa negara itu dikonsepskan sebagai himpunan jabatan-jabatan yang mana jabatan [ragam jabatan atau bahkan pembuat regulasi] diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dari sini menjadikan kekuasaan mempunyai dua aspek: [1] aspek politik, dan [2] aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Pengertian ini dimaknai bahwa kekuasaan selain dapat bersumber dari konstitusi juga dari luar konstitusi [inkonstitusional]. Dalam ilmu politik, misalnya, dikenal

dengan istilah [peristiwa] kudeta atau perang. Sementara kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut menjadi penting jika dilihat dari sisi kekuasaan yang mengabaikan hukum [regulasi], tampak bahwa regaman kebijakan di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan strategis sangat terikat dari kebijakan kepemimpinan tertinggi negara, baik pemimpin itu sebagai pemimpin pemerintahan di departemen atau pemimpin negara.

### **3. Kerangka Konsep**

#### **3.1 Kawasan Perbatasan**

Pengertian *border* [dimaknai sebagai perbatasan] seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, *border* memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik, ekonomi dan geografis berdasarkan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2004). Oleh karena itu wilayah perbatasan [*border area*] dengan sinonim yang sama *cross-border area* yang secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah yang tidak hanya pada struktur ekonomi, politik dan sumber daya melainkan pertahanan, keamanan dan kedaulatan yang terdiri atas dua atau lebih kekuasaan (Joyodipuro, 1992; Blair 1995; Henrikson, 2000).

Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo (2004), batas wilayah dapat dibagi menjadi pendekatan. [a]. *Natural Border*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali

dianggap sebagai batas politik. [b]. *Artificial Border*, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan [batu, dinding], batas geometris [menggunakan batas koordinat bumi], dan batas *cultural*/budaya [perbedaan budaya, etnis dan ideologi].

Dalam konteks memahami makna kawasan perbatasan sebagai perbandingan dapat dilihat berdasarkan fungsinya sesuai tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1  
Fungsi Kawasan Perbatasan

Guo (2004)	Van Well (2006)
<p>[1]. Perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara.</p> <p>[2]. Sebagai fungsi <i>legal</i>, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan Negara.</p> <p>[3] Sebagai fungsi <i>kontrol</i> dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah.</p> <p>[4] Sebagai fungsi <i>fiscal</i>, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.</p>	<p>[1]. Sebagai <i>barrier</i>/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi.</p> <p>[2]. Sebagai <i>jembatan</i>, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas.</p> <p>[3]. Batas sumber daya (<i>resources</i>), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah.</p> <p>[4]. Sebagai simbol <i>identitas</i>, lambang identitas suatu wilayah/bangsa/negara.</p>

*Sumber: Guo (2004); Van Well (2006)*

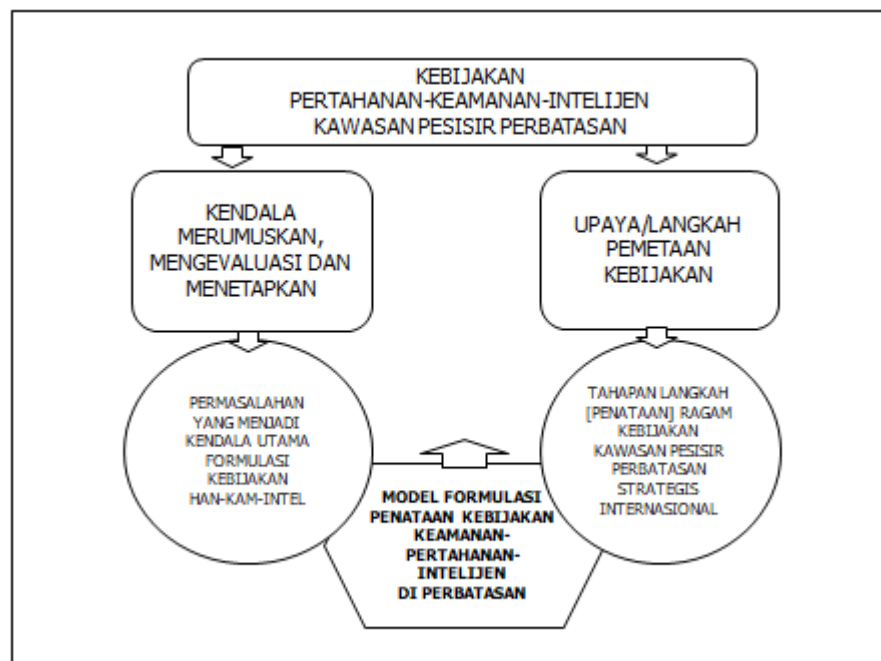
### 3.2 Pertahanan-keamanan-intelijen

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah dimaknai sebagai [ruang] yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative, dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, *et al.* (2011) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik

tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah, tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis [bergerak]. Sementara, komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan [infrastruktur], manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah [kawasan] menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Berdasarkan pada penataan kewilayahan menjadi penting memknai pertahanan, keamanan dan intelijen secara terintegrasi [terpadu].

#### 4. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa konstruksi teoritis terkait dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Pertahanan keamanan dan intelijen di Kawasan Pesisir perbatasan strategis. Dalam pengembangan kawasan mencakup dua hal pokok yang prinsip. Pertama, kawasan yang akan dikembangkan [kendala pengembangan]. Kedua, pihak yang mempunyai kewenangan memformulasikan [dalam hal ini pemerintah, sementara daerah dapat mengusulkan dan membuat regulasi pada tingkat daerah]. Pada bangunan [konstruksi sebagai formulasi teoritisnya], menjadikan konflik berbagai kebijakan dalam pertahanan, keamanan dan intelijen yakni kendala menjadi penting dan saling terintegrasi.

## **5. Definisi Operasional**

### **1. Model Kebijakan**

model kebijakan adalah rumusan [diformulasikan] yang ditetapkan berdasarkan bidang pertahanan, keamanan dan intelijen yang saling berhubungan dalam wujud regulasi sesuai peraturan yang terendah sampai yang tertinggi undang-undang.

### **2. Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen**

Kebijakan pertahanan, keamanan intelijen yang terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan antara pertahanan-keamanan-intelijen dalam mempertahankan regulasi pada instansi berwenang pemerintah pusat, departemen pertahanan, kepolisian, kementerian dalam negeri, dan badan intelijen negara.



3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah [daerah] Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan [perbatasan daerah]; Sementara itu ada juga kawasan perbatasan di laut adalah sisi dalam garis batas yurisdiksi atau teritorial hingga kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara lain. Dalam hal garis batas yang belum disepakati menggunakan garis batas klaim terjauh. Oleh karena itu Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

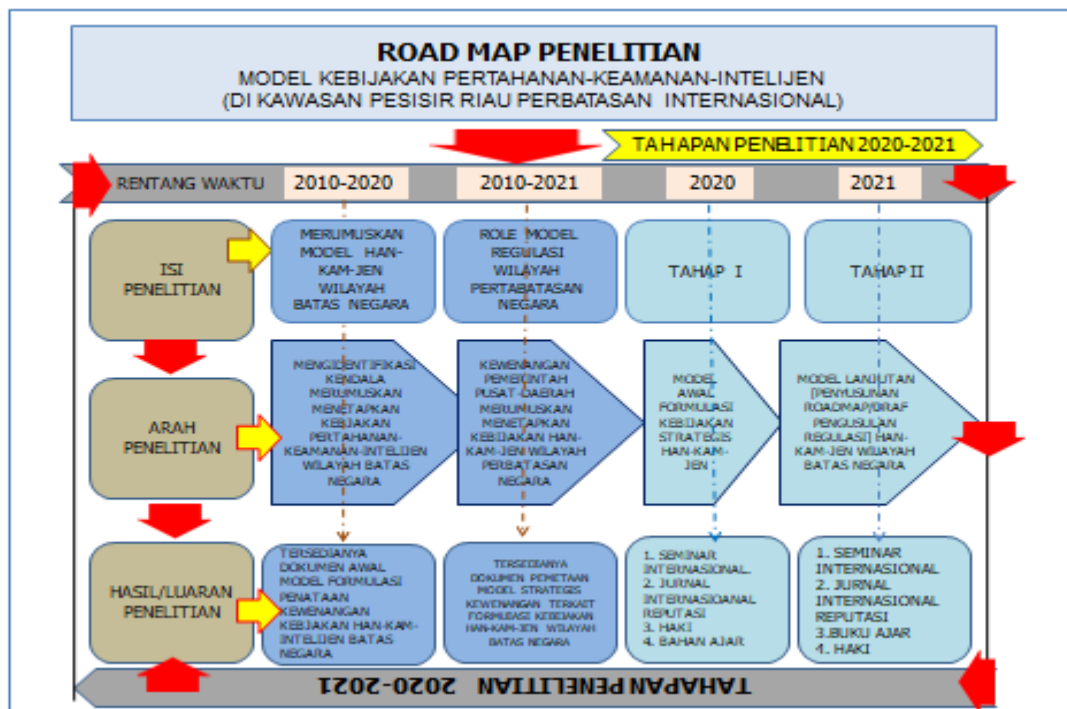
3. Kawasan Perbatasan Strategis Internasional. Dalam pengertian ini, kawasan perbatasan strategis internasional dimaksud adalah keberadaan Palika. Tanpa diperbandingkan diketahui bahwa Palika dalam konteks ragam kebijakan, berbeda dengan Pulau Laut yang dinilai sama secara strategis internasional karena letaknya berdekatan dengan negara asing. Di Palika keberadaan Panipahan sebagai ibu kota, dan Pulau Jemur yang langsung berada di Selat Melaka [alir perdagangan dunia] itulah dalam konteks strategisnya begitu juga Pulau Laut.

4. Kawasan Pesisir Perbatasan Strategis. Yang dimaksud sebagai pengembangan kawasan pesisir perbatasan strategis adalah kabupaten di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan [WKP] yang ditetapkan sesuai regulasi karena memiliki potensi utama ditambah kawasan yang letaknya terluar di tiga kabupaten Provinsi Riau.

5. Model Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen di kawasan pesisir perbatasan Staretgis Internasional. Yang dimaksud sebagai strategi pengembangan kawasan perbatasan strategis adalah langkah atau tahapan yang perlu dilakukan di tiga kabupaten [Kabupaten Rokan Hilir, Kota Duma dan Kabupaten Kepulauan Meranti] di Provinsi Riau sebagai laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan [WKP] yang ditetapkan sesuai regulasi karena memiliki potensi utama ditambah kawasan yang letaknya terluar sebagai kawasan perbatasan tidak saja nasional, melainkan internasional.

## **6. Roadmap Penelitian**

Sebagai landasan berfikir dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan dalam bentuk peta jalan [*road map*]. Peta jalan [*road map*] penelitian dapat membantu menjelaskan Pengembangan Kawasan Pesisir Perbatasan Internasional Provinsi Riau [Model Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen] pada gambar 3 berikut ini.



Sumber: Hasil olahan 2020

Gambar. 3 Roadmap Penelitian

### Model Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen: di Kawasan Riau Pesisir Perbatasan Internasional

Berdasarkan gambar 3 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini direncanakan dilakukan selama 2 tahun [2020-2021] yang dilakukan secara berkelanjutan. Secara sederhana, penelitian berjudul, “Model Kebijakan Pertahanan-Keamanan-Intelijen” merupakan rangkaian penelitian tentang metode atau tatacara [langkah-langkah] yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah penelitian ini secara keseluruhan bertahap selama dua tahun dapat dilihat sesuai penjelasan di bawah ini.

[1]. Pada tahap pertama [tahun 2020], penelitian ini akan menjawab dan menjelaskan sesuai tujuan yakni mengidentifikasi kendala, evaluasi dan formulasi [model tatanan kebijakan pertahanan-keamanan-intelijen/Han-Kam-Jen di wilayah perbatasan negara]. Mengidentifikasi, dan menjelaskan model formulasi strategis penataan kebijakan kewenangan pemerintah pusat serta peran daerah dalam ragam

kebijakan di bidang Pertahanan, keamanan dan intelijen di wilayah perbatasan negara yang terjadi konflik kebijakan. Pada tahap pertama sebelumnya, keluaran [rencana capaian] penelitian merupakan rekomendasi terhadap studi awal pentingnya mengetahui, mengevaluasi dan memformulasi model penataan awal sebagai upaya memetakan ragam dan wujud regulasi menyangkut kawasan perbatasan [wilayah negara] di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen. Upaya ini menjadi rekomendasi pendahuluan sebagai landasan penelitian berikutnya [tahap kedua].

[2]. Pada tahap kedua [tahun 2021], rencana keluaran [rencana capaian], penelitian akan menghasilkan model roadmad formulasi strategis model, dan pengusulan regulasi kebijakan pertahanan-keamanan-intelijen batas wilayah perbatasan negara di kawasan pesisir Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

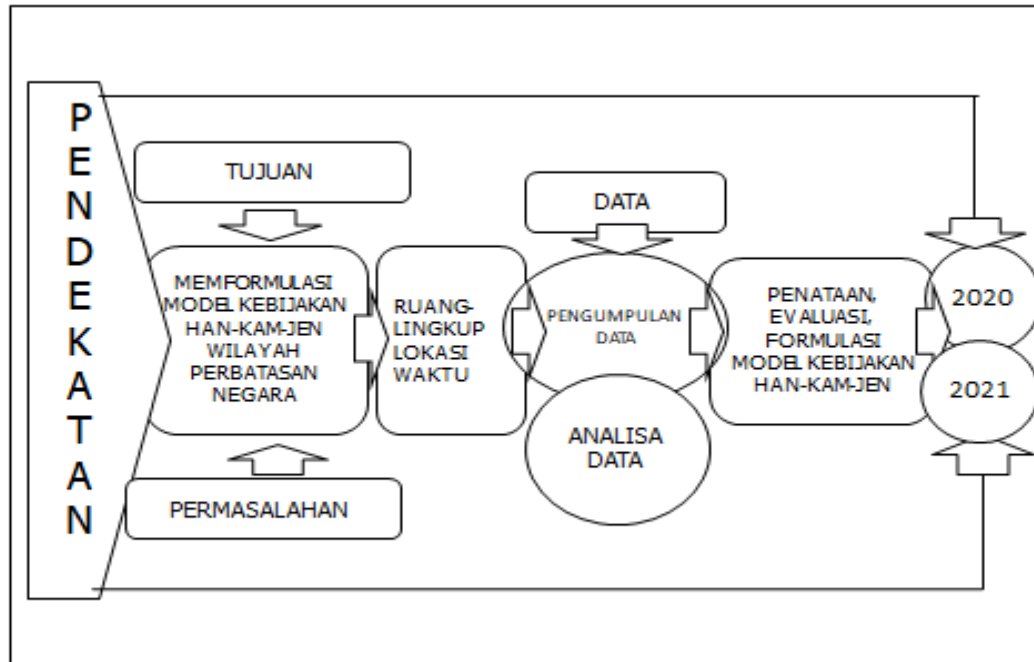
## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan Alur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati [Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000]. Ciri pendekatan kualitatif adalah adanya upaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau karena gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat.

Di sini peneliti menelaah formulasi model kebijakan pertahanan-keamanan-intelijen di kawasan pesisir perbatasan [wilayah perbatasan negara]. Berdasarkan pendekatan kualitatif peneliti dapat melakukan penelitian lapangan lebih mendalam

terhadap unit analisis yang diteliti sehingga data yang didapat lebih akurat sesuai alur penelitian. Untuk lebih jelasnya alur penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Pendekatan dan Alur Penelitian

## 2. Ruang Lingkup, Lokasi dan Waktu Penelitian

### 2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Studi tentang model kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen di Kawasan Pesisir Perbatasan [perbatasan wilayah negara] dibatasi pada pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan swasta [dalam perannya sebagai si empunya wilayah atau kawasan] tentang regam, evaluasi dan penataan

model yang relevan terkait kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen, kajian ini meliputi:

[1]. Kendala utama pemerintah pusat [negara] merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan [batas wilayah negara] secara terintegrasi. [2]. Formulasi [model kebijakan] merupakan penataan kebijakan langkah atau tahapan dalam konteks ini dibatasi terkait ragam regulasi di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen pada kawasan pesisir perbatasan dengan negara tetangga [perbatasan internasional].

## 2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan analisis dalam penelitiannya, sekaligus menjadi lokasi pengumpulan data. Lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai dalam konteks wilayah administratif. Sementara pengumpulan data terkait semua regulasi yang terfokus pada bidang pertahanan, keamanan dan intelijen di wilayah perbatasan negara.



Gambar 5. Lokasi Penelitian  
[Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti sebagai kawasan pesisir perbatasan strategis internasional Provinsi Riau]

### 2.3 Waktu Penelitian

Seluruh kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 8 bulan untuk tahun pertama. Sementara rentang waktu tahun penelitian dimulai dari 2010-2020 sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan secara khusus dan regulasi tentang batas wilayah negara yang sedang akan direvisi.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, data yang diperoleh dari sumber pertama yang mengetahui langsung permasalahan penelitian seperti data tentang berbagai kebijakan tentang pengembangan kawasan perbatasan serta urusan bidang pertahanan, keamanan dan intelijen. Data primer diperoleh berdasarkan sumber primer melalui informan. Informan ditentukan dengan teknik purposif. Artinya dalam konteks penelitian ini informan dipilih berdasarkan pengetahuan informasi dan kewenangan yang dimilikinya, serta keterlibatan dalam keahlian penelitian yang sedang ditelaah. Adapun informan dapat dilihat berdasarkan tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 1.  
Rencana Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Lembaga/Jabatan
1.	Suyatno	Bupati Rokan Hilir
2.	Irwan Nasir	Bupati Kepulauan Meranti
3.	Wali Kota Dumai	PJS Wali Kota Dumai
4.	Job Kurniawan	Plt Sekda Rokan Hilir
5.	Dirjen Otda	Kementerian Dalam Negeri
6.	Saibansyah Dardani	Pimpinan Media Online Batamoday
7.	Humas/Staf Ahli	Kementerian Pertahanan
8.	Wawan Purwanto	Humas BIN
9.	Anggota DPD	Poksi Perbatasan
10.	Anggota DPD RI	Komite 1
11.	Umar Natuna	Akademisi/LSM

Sumber: Rencana Penelitian 2020

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua seperti hasil laporan, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan berita di media cetak maupun elektronik.



#### **4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan wawancara terhadap sejumlah informan mengenai ragam regulasi pertahanan, keamanan dan intelijen dan yang lainnya sesuai yang akan dikaji dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara. Wawancara dilakukan mendalam, dan terfokus pada tujuan yang hendak dijawab pada penelitian ini.

Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara, peneliti telah membuat beberapa koridor dan petunjuk agar jawaban yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang hendak diteliti. Sementara itu, untuk pengumpulan data sekunder peneliti akan menelusuri melalui instansi pemerintah maupun melalui lembaga-lembaga terkait. Penelusuran data yang akan dikumpulkan tersebut meliputi dokumen resmi, dokumen tertulis, karya ilmiah, data statistik, dan yang lainnya yang mendukung.

Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan melaksanakan Fokus Grup Diskusi [FGD]. Cara ini untuk lebih membantu secara langsung diskusi perihal memformulasi model kebijakan pertahanan, keamanan dan intelijen di kawasan pesisir perbatasan strategis internasional di Provinsi Riau [Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti]. Kesemuanya dalam kerangka mengumpulkan data untuk kepentingan penelitian.

#### **5. Analisa Data**

Sebagai penelitian kualitatif yang terkait dengan pengumpulan dokumentasi ragam kebijakan, maka teknis analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur kegiatan

yakni berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan setelah dilakukan verifikasi atau pembuktian. Ketiga prosedur data dan teknik analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pada tahap alur reduksi data, kegiatan yang dilakukan adalah berupa pengelompokkan sesuai dengan topik permasalahan. Kedua, tahap penyajian data, merupakan kegiatan penyusunan data secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan polanya, selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian. Ketiga, tahap terakhir dalam kegiatan analisis penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan untuk membuat rekomendasi.

## G. JADWAL KEGIATAN

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan							
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt
1	Persiapan Administrasi								
2	Perizinan dan ke lapangan								
3	Seminar & Workshop								
4	Penyusunan Instrumen								
5	Pembekalan asisten lapangan								
6	Observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder								

7	Proses entri data								
8	Proses cleaning data								
9	Analisis data								
11	Pembuatan laporan								
12	Penyampaian laporan dan Desiminasi hasil penelitian								

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar–Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Albintani, Muchid. 2016. Berburu Rente di Pulaua Batam: Provinsi Istmewa Singapura dan ‘Negara Bintang’. Yogyakarta: Deepublish.
- Akaha, T. and Anna, V. (eds). 2005. Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia. Japan: United Nations University Press.
- Amina, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bappenas. 2016. Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara. Direktorat daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan kementerian ppn/bappenas.
- BNPP. 2011. Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Blair, J.P. 1995. Local Economic Development-Analysis and Practice. Canada: Sage Publication.
- BKPM. 2011. Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan. Badan koordinasi penanaman modal. 1-38.
- Damanhuri.1990.Perencanaan Pembangunan Wilayah Terisolir. Yogyakarta: Piramida.
- Daniel, M. 2002. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendy Kurniadi. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Dipenegoro (tidak dipublikasi).
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. Teori Lokasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Enni lindia mayona, Salahudin, dan Rahmi Kusmastuti. 2011. Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat Jurnal Tata Loka; 13 [2]:119-134. Mei.
- Glasson, J. 1977. Pengantar Perencanaan Wilayah. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit LPFE-UI.

- Green Cross, 2000. National Sovereignty and International Water Courses. Hague: Green Cross International.
- Guo, R, 2004. Cross Border Resource Management, Regional Science Association of China
- Gevisioner, Rindukasih Bangun dan Karyanti. 2013. Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. Jurnal Bina Praja. 5 [1]: 53-62. Maret.
- Hajisarosa, Poernomosidi. 1978. Teori dan Strategis Pengembangan Wilayah untuk Negara R.I
- Henrikson, A. K. 2000. Facing Across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage. London: Routledge
- Heri Apriyanto. 2009. Analisis Strategi Kawasan Pengembangan Ekonomi [KPE] Bagansiapi-api Provinsi Riau. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 11 [1]: 10-17. April.
- House, J. W. 1980. "The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers."
- Huda, Nimatul. 2005. Negara, Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.
- Ishak, A. F. 2003. Membangun Wilayah Perbatasan Kalimantan dalam Rangka Memelihara dan Mempertahankan Integritas Nasional. Jakarta: Indomedia.
- Judistira. K.Gurun . 1999. Paradigma Sosial Budaya dalam Pengembangan Masyarakat, makalah rapat Perbatasan Jateng – Jabar
- Juita Carolina Lesawengen. 2016. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe Berbasis Ekowisata Bahari . JUMPA, 3 [1] : 190 – 200. Juli.
- JPP-UGM (2010). Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Kencana Inu Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahendra Putra K. 2010. Politik Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbasis Teknologi Geospasial. Penelitian disertasi doktor ., Universitas Brawijaya Malang, Juni.
- Manoney, J. 2007. Qualitative Methodology and Comparatives Politic. Comparative Political Studies. 40 [2]: 122-144.
- Muradi. 2015. Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov. 1 [1]: 25-34. April.
- Newman, D. 2006. The lines that continue to separate us: borders in our 'borderless' world. Progress in Human Geography 30 (2): pp. 143-161.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Nurmandi, Achmad, Trisno Aji Putra dan Nikolas Panama. 2012. Menjaga Indonesia dari Kepri: Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Tanjungpinang: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri
- Partnership. 2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Partnership Policy Paper No. 2.

- Prescott, J. R. V. 1987. *Political Frontiers and Boundaries*. London: Allen & Unwin.
- Rodriguez, N. 1996. 'The Battle for the Border: Notes on Autonomous Migration, Transnational Communities, and the State'. *Social Justice* 23(3): 21–37.
- Routledge. Rumford, C. 2006. 'Borders and bordering', in G. Delanty (eds.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*. London: Routledge.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan darat Indonesia-malaysia (studi evaluatif di Kecamatan Entikong)*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI. Widyariset, Vol. 16 No.1, April: 73–80.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Uiboupin, J. 2007. *Cross border cooperation and economic development in border*. London: Palgrave.
- Van Well, L. 2006. *Cross-Border Typologies in the Enlargement Area*. New York: Sage Publications.
- Walters, W. 2006. *Border Control*. *European Journal of Social Theory*. London: Sage Publications.
- Zulkarnain, Muhammad Haris dan Kholis Roisah. 2018. *Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia*. *Jurnal Magister Hukum Udaya*. 7 [4]: 490-515. Desember
- Sudirman, Arfin dan Achmad Fadly. 2018. *Perluakah Reformasi Sektor Intelijen di Tubuh Pertahanan Indonesia?* *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*. 4 [1]: 1-15. April.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 147 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44).

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 tentang, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir.

## I. REKAPITULASI BIAYA

Adapun rencana pembiayaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3,**  
**Rekapitulasi Pembiayaan Penelitian**

NO	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN	
		TAHUN KE 1	TAHUN KE 2
1	Bahan dan Peralatan	6.300.000	1.300.000
2	Perjalanan dan Akomodasi	18.100.000	19.100.000
3	Administrasi, Laporan dan lainnya	14.650.000	11.600.000
	<b>Total Per Tahun</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>100.000.000</b>	

## J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI

**Tabel 4.**  
**Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti**

N o.	Nama	NIDN	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Muchid, M.Phil, PhD	0017076803	Ilmu Pemerintahan	10 jam /minggu	1. Mempersiapkan draf awal proposal 2. Mengkoordinasi diskusi proposal 3. Menyiapkan 33nstrument

					<p>penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengkoordinasi penelitian lapangan</li> <li>5. Mengkoordinasi analisis data</li> <li>6. Mengkoordinasi angket, wawancara dan observasi</li> <li>7. Menyusun laporan, seminar dan melakukan publikasi ilmiah</li> </ol>
2.	Adlin, S.IP, M.Si	000802810 4	Ilmu Pemerintahan	10 jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra diskusi drafting proposal</li> <li>2. Mensuplay konseptual</li> <li>3. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal</li> <li>4. Pendamping angket, wawancara dan observasi</li> <li>5. Melakukan input data kualitatif</li> <li>6. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir</li> </ol>
3	Ismandianto, S.I.Kom, M.I.Kom	882742001 6	Ilmu Komunikasi	8 jam /minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra diskusi drafting proposal</li> <li>2. Mensuplay konseptual</li> <li>3. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal</li> <li>4. Pendamping angket, wawancara dan observasi</li> <li>5. Melakukan input data kualitatif</li> <li>6. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir</li> </ol>
4.	Mimin Sundari, S.Sos, M.Si	001806850 2	Administrasi Publik	8 jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra diskusi drafting proposal</li> <li>2. Mensuplay konseptual</li> <li>3. Melakukan wawancara dalam aspek internal dan eksternal</li> <li>4. Pendamping angket, wawancara dan observasi</li> <li>5. Melakukan input data dan kualitatif</li> <li>6. Mitra diskusi dalam penyusunan laporan akhir</li> </ol>

### K. Justifikasi Anggaran Penelitian

Justifikasi anggaran penelitian adalah sebagai berikut:

**Tahun pertama : Rp. 50,000,000,00**



Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Konsumsi acara FGD Pekanbaru	Orang	27.00	25,000	675,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	2.00	150,000	300,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	2.00	150,000	300,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Rental Mobil Innova di Dumai	Kegiatan	3.00	350,000	1,050,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Rental Mobil Innova di Rokan Hilir	Kegiatan	3.00	350,000	1,050,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa speed board di Meranti	Kegiatan	2.00	1.5000.000	3,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	3.00	150,000	450,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Rental Mobil Meranti	Kegiatan	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Bahan Bakar Minyak Mobil (8 bulan)	Liter	570.00	8,000	3,550,000
BELANJA BAHAN	Biaya Seminar/ Workshop	Kegiatan	4.00	1,750,000	7,000,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak CD	Buah	100.00	10,000	1,000,000
BELANJA BAHAN	Animasi	Paket	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA BAHAN	Modul	Paket	2.00	3,500,000	7,000,000
BELANJA BAHAN	Pembelian Scan	Buah	1.00	2,750,000	2,750,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak bahan progres	Eksmplar	3.00	450,000	1,350,000
BELANJA BAHAN	Buku jurnal/data sekunder	Buah	40.00	125,000	5,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BAHAN	Foto kopi bahan	Lembar	1200.00	200	240,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak Fotokopi bahan wawancara	Eksmplar	50.00	15,000	750,000

BELANJA BAHAN	Penggandaan Laporan Pelaporan dan Penjiliran	Eksemplar	8.00	200,000	1,600,000
BELANJA BAHAN	Pembelian Printer	Buah	2.00	1,500,000	3,000,000
BELANJA BAHAN	ATK	Paket	1.00	2,500,000	2,500,000
BELANJA BAHAN	Internet	Paket	1.00	3,500,000	3,500,000
BELANJA BAHAN	Buku Note	Buah	45.00	165,000	7,425,000
BELANJA BAHAN	Flask disk ( Penyimpan data)	buah	10.00	150,000	1,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi lokal	Orang	2.00	275,000	550,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Penginapaan di Dumai	orang	2.00	650,000	1,300,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Penginapaan di Rokan Hilir	orang	2.00	650,000	1,300,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumpsum di Dumai	Orang	9.00	30,000	270,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Penginapan di Meranti	orang	2.00	650,000	1,300,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumsum di Marenti	hari	3.00	400,000	1,200,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumpsum Dumai	hari	3.00	150,000	450,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumpsum Rokan Hilir	hari	3.00	150,000	450,000

Total : Rp. 50.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*)

**Tahun II : Rp. 50,000,000,00**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Kosumsi acara FGD Pekanbaru	Orang	27.00	25,000	675,000

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	2.00	150,000	300,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	2.00	150,000	300,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Rental Mobil Innova di Dumai	Kegiatan	3.00	350,000	1,050,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa speed board di Meranti	Kegiatan	2.00	1.5000.000	3,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Ojek	Kegiatan	3.00	150,000	450,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Sewa Rental Mobil Meranti	Kegiatan	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Bahan Bakar Minyak Mobil (8 bulan)	Liter	570.00	8,000	3,550,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak CD	Buah	100.00	10,000	1,000,000
BELANJA BAHAN	Animasi	Paket	2.00	500,000	1,000,000
BELANJA BAHAN	Modul	Paket	2.00	3,500,000	7,000,000
BELANJA BAHAN	Pembelian Scan	Buah	1.00	2,750,000	2,750,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak bahan progres	Eksmplar	3.00	450,000	1,350,000
BELANJA BAHAN	Buku jurnal/data sekunder	Buah	40.00	125,000	5,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BAHAN	Foto kopi bahan	Lembar	1200.00	200	240,000
BELANJA BAHAN	Perbanyak Fotokopi bahan wawancara	Eksmplar	50.00	15,000	750,000
BELANJA BAHAN	Penggandaan Laporan Pelaporan dan Penjilitan	Eksemplar	8.00	200,000	1,600,000
BELANJA BAHAN	Pembelian Printer	Buah	2.00	1,500,000	3,000,000
BELANJA BAHAN	ATK	Paket	1.00	2,500,000	2,500,000
BELANJA BAHAN	Internet	Paket	1.00	3,500,000	3,500,000
BELANJA BAHAN	Buku Note	Buah	45.00	165,000	7,425,000

BELANJA BAHAN	Flask disk ( Penyimpan data)	buah	10.00	150,000	1,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi lokal	Orang	2.00	275,000	550,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumpsum di Dumai	Orang	9.00	30,000	270,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Penginapan di Meranti	orang	2.00	650,000	1,300,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumsum di Marenti	hari	3.00	400,000	1,200,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Lumpsum Dumai	hari	3.00	150,000	450,000

Total :**Rp. 50.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*)

Total dana Tahun I dan Tahun ke 2 Rp. 100.000.000,00-  
Terbilang : *seratus juta rupiah*

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil
2.	Nama Populer	Muchid Albintani
3.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4.	JabatanFungsional/Pangkat /Golongan	Lektor Kepala/Pembina Tingkat I/IV-b
5.	NIP/NIK/Identitas lainnya	19680717 200003 1001
6.	NIDN	0017076803
7.	Nomor ID/URL Profil Shinta	6107938
8.	ORCID iD	- ResearcherID: H-2494-2016 - URL: <a href="http://www.researcherid.com/rid/H-2494-2016">http://www.researcherid.com/rid/H-2494-2016</a> - ORCID: <a href="http://orcid.org/0000-0003-0822-3922">http://orcid.org/0000-0003-0822-3922</a>
9.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kijang/17 Juli 1968
9.	E-mail	mbintani@unri.ac.id muchid@lecturer.unri.ac.id
10.	Nomor Telepon/HP	+62 81276438070
11	Alamat Kantor	FISIP Universitas Riau, Kampus Binawidya, JL. H.R Soebrantas KM 12.5, Tampan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
12	Nomor Telepon/Faks	+62 761 63277
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 dan S2
	Mata Kuliah yang Diampu (S1)	- Studi Masyarakat Melayu
		- Ekonomi Politik Lokal
		- Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
		- Sistem Politik Indonesia
14		- Ekologi Pemerintahan
		- Pemikiran Politik di Indonesia
		- Masalah-Masalah Pemerintahan
		- Analisa Kekuatan Politik di Indonesia
		- Dasar Dasar Ilmu Politik
		- Komunikasi Pemerintahan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemikiran Politik Islam</li> <li>- Kajian Pemerintahan Melayu</li> <li>- Teknologi Informasi Pemerintahan</li> </ul>
15	Mata Kuliah yang Diampu (S2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah</li> <li>- Manajemen Strategis dan Pemerintahan</li> <li>- Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</li> <li>- Politik Internasional</li> <li>- Kerja sama Luar Negeri dan Otonomi Daerah</li> <li>- Hankam dan Resolusi Konflik</li> <li>- Kapita Selekta Hubungan Internasional</li> <li>- Komunikasi Politik dan Pemerintahan</li> <li>- Merketing Politik</li> </ul>

## B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau, Pekanbaru	Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia	Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Sosiologi	Sains (Ilmu) Politik
Tahun Lulus	1994	2004	2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Dimensi Ekonomi Politik Pelaksanaan Otonomi Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Riau	Pembangunan Pengusaha Lokal Pulau Batam Indonesia: Respon Pengusaha Lokal Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat (1997-2002)	Orde Baru dan Reformasi: Kajian Kes Otorita Batam, Indonesia (1998-2004)
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Sofyan Samad, MA 2. Drs. Ali Yusri, MS	Prof. Dr. Dato' Abdul Rahman Embong	1. Prof. Dr. Dato' Abdul Rahman Embong 2. Prof. Madya Dr. Sity Daud

**C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2013	Perjuangan Otonomi Khusus Riau dan Masalah Disintegrasi Lokal	Lemlit - UR	Rp.15.000.000,-
2	2013	Strategi Komunikasi dan Budaya Dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Melayu (Tahap I)	Dikti / BOPTN	Rp.56.000.000,-
3	2014	Strategi Komunikasi dan Budaya Dalam Mempertahankan Identitas Masyarakat Melayu (Tahap II)	Dikti / BOPTN	Rp.50.000.000,-
4	2015	Manajemen Komunikasi Program CSR PT. Perkebunan Nusantara V (Studi Evaluasi Komunikasi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau	DPRM/PUPT	Rp56.000.000
5.	2017	Pengembangan Kawasan Perbatasan Provinsi Riau (Kasus Kabupaten Rokan Hilir)	PUPT	Rp46. 000.000
6.	2018	Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	PUPT	Rp48.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Th	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)/Keterangan
1.	2013	Sosialisasi tentang Perilaku Cerdas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Bagi Pemilih Perempuan	DIPA UR	Rp5.000.000
2.	2013	Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2014-2019	KPU Pusat	SK No.945/Kpts /KPU/Th 2013

3.	2014	Nara Sumber Kegiatan Workshop Metode Penelitian, Teknik Analisa Data dan Penulisan Jurnal Ilmiah	IPDN Kampus Riau, Ujung Batu	Sertifikat
4.	2014	Nara Sumber Dialog Publik “Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik	Ombudsman Perwakilan Riau	Sertifikat
5.	2014	Nara Sumber Simanr Nasional ASPIKOM Riau dengan tema “Communication is a power Speak Loud for Indonesia Better”	ASPIKOM Riau	Sertifikat
6.	2014	Nara Sumber Seminar Internasional Budaya dengan Tema “Menelusuri Budaya Melayu Serumpun Indonesia-Malaysia	BEM UNRI	SRTF-BEM UR/VI/2014-004
7.	2016	Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	BOPTN	Rp10.000.000
8.	2017	Nara Sumber Diskusi Publik “Peran Media di Wilayah Perbatasan dalam Membangun Semangat Nasionalisme Guna Mensukseskan Kepentingan Nasional. Selasa, 15 Agustus 2017, PIH Pulau Batam.	Forum Pimpinan Redaksi Provinsi Kepulauan Riau	Sertifikat
9.	2017	Nara Sumber Utama Focus Grup Diskusi “Penegasan Pancasila Sebagai Dasar negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” . Senin, 13 November 2017, Hotel Premiere,Pekanbaru.	Majelis Permusyawarata Rakyat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau	Sertifikat
10.	2018	Nara sumber diskusi politik Dengan tema, “ Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD dan Pembangunan Demokrasi”, Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP UNRI, Jumat, 30 November 2018, Gedung Pascasarjana lt2, Pekanbaru.	PPS Prodi Ilmu Politik	Sertifikat



**E. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	The Infleuence of State and Market on The Development of Industrial Zone in Malaysia and Indonesia	International Journal of Business and Management Studies ISSN: 1309-8047 (online), Turkey.	Vol 5, No 1, 2013
2.	Tinjauan Ekonomi Politik Badan Usaha Milik Daerah	Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah	Vol 11/No.2 /Desember 2013
3.	Political Economy Communication Perspective: The 'Relationship' Between Capitalism and Illegal Logging in Riau, Indonesia	OIDA International Journal of Sustainable Development, Canada [ISSN 1923-6654 (print) ISSN 1923-6662 (online) www.oidaijsd.com]	Vol.09 No.04 (2016)
4.	Quo Vadis MPR RI: Antara Eksistensi dan Legalitas Produk	Jurnal Nakhoda ISSN 1829-5827	Juli-Desember, 2015. Vol. 14 No.24
5.	Budaya Demokrasu di Sulawesi Selatan : Persepktif Strukturasi	Jurnal Nakhoda ISSN 1829-5827	Januari-Juni, 2016. Vol. 15 No.25
6	Participation and Political Domination Parties in Indonesia Reformation Era	Global Journal of Political Science and Administration) ISSN 2054-6335 (Print), ISSN 2054-6343(Online) (www.eajournals.org)	Vol.5, No.5, pp.17-23, November 2017
7.	Strategic Border Region and Palika Potential Main in the Coastal Malaka Strait, Riau, Indonesia	Global Journal of Politics and Law Research. ISSN 2053-6321(Print), 2053-6593(Online) (www.eajournals.org)	Vol.5, No.7, pp.17-24, December 2017. Available at SSRN: <a href="https://ssrn.com/abstract=3088901">https://ssrn.com/abstract=3088901</a>

8.	Pancasila dan Identitas ke-Indonesia-an: Sebuah Catatan Krisis.	Jurnal Nakhoda: ISSN 1829-5827. <a href="https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/5825">https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/5825</a>	Vol 16 No.28, pp. 43-49. Juli-Desember 2017
9.	State Intervention in Economic Zone Batam Island, Indonesia: Law-Political-Economic Approach	Arctic Journal. ISSN: 0004-0843, E-ISSN: 1923-1245 ( <a href="http://www.arcticjournal.org/">http://www.arcticjournal.org/</a> ) Impact Factor: 1.022 5-Year Impact Factor: 1.339 Eigen factor Score: 0.001550 Article Influence Score: 0.541 Indexes: Science Citation Index Expanded [ <b>Thomson Reuters</b> ] dan <b>Scopus</b> .	Vol 71, No.10, pp.27-41, October 2018.

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Tempat dan Waktu
1.	International Conference on Business and Management organized by the Social Sciences Research Society (SoSReS)	The Influence of State and Market on the Development of Industrial Zone in Malaysia and Indonesia.	Izmir, Turkey, 26-27 April 2013.
2.	7th International Seminar on Ecology, Human Habitat and Environmental Change in the Malay World.	'Malay' Malaysia-Indonesia in the Nation State Landscape	Universitas Riau, Pekanbaru, 19-20 Agustus 2014.
3.	Konferensi Nasional Komunikasi, "Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia"	Kecerdasan Identitas dan Kekuatan Komunikasi: Menuju Indonesia yang Demokratis	Pulau Lombok, 18-20 November 2014.
4.	The 3rd International Conference on Computational and Social Sciences [ICCSS-Organized by joint conference the Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan and Universiti Teknologi Malaysia.	Malay in Malaysia and Riau, Indonesia: A Difference.	Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, August, 25-27 2015.

5.	International Conference on Sustainable Development 2015 Indonesia. [OIDA Canada joint with Universitas Trisakti Jakarta].	Political Economy Communication Perspective: The 'Relationship' Between Capitalism and Illegal Logging in Riau, Indonesia.	Hotel Ciputra Jakarta, Indonesia from December 01 to December 03, 2015.
6.	25th World Congress of Political Science [International Political Science Association/IPSA], Brisbane Australia.	Strategic Border Region, Economic Zone and State Intervention in Batam Island, Indonesia: Law-Political-Economic Approach	Brisbane Convention & Exhibition Centre (BCEC), 21-25 July 2018, South Bank 4101 Queensland, Australia.
7.	4th International Conference on Contemporary Social and Political Affairs [ICoCSPA] 2018	Asymmetric Decentralization in Coastal Areas Strategic Boundary, Indonesia: Law-Political-Decentralization Perspective	Santika Premiere Hotel Surabaya, August, 13th 2018.
8.	The Second Bogor International Conference For Social Science [BICSS 2018], September, 25-26 2018, Bogor, Indonesia	Political Identity and The Nation-state in Riau	HOTEL ONIH Jl. Paledang No. 52 Bogor 16720 Bogor, West Java, Indonesia

**G. Penerbitan dan Tulisan Dalam Buku 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku (Tulisan dalam Buku)	Penerbit, Tempat Terbit dan Tahun Terbit	ISBN
1.	Dari Lubang Kembali ke 'Lubang'.	Yayasan Sagang, Pekanbaru, 2014	9786029137712
2.	Kecerdasana Identitas dan Kekuatan Komunikasi Menuju Indonesia yang Demokratis. (hal 1-19). Dalam buku, "Masa Depan Demokrasi, Masa Depan Indonesia".	Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia [ISKI], Jakarta, 2014.	978-602-14699-8-9
3.	Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Spasial: Sumbangan Pemikiran Dari Riau (hal 387-396). Dalam buku, "Sain	Persatuan Sain Sosial Malaysia dan Institut Kajian Malaysia	978-983-9731-03-3

	Sosial Dan Kajian Pembangunan: Kumpulan Rencana Penghormatan untuk Profesor Abdul Rahman Embong.	dan Antarabangsa, Ikmas, UKM, Selangor, 2014.	
4.	Berburu Rente di Pulau Batam: Provinsi Istimewa Singapura dan 'Negara Bintan'.	Deepublish, Yogyakarta, 2016	9786024013028 <a href="https://opac.unri.ac.id/index.php?author=%22Muchid+Albintani%22&amp;search=Search">https://opac.unri.ac.id/index.php?author=%22Muchid+Albintani%22&amp;search=Search</a>
5.	Revolusi Longkang: Kumpulan Sajak Politik	Deepublish, Yogyakarta, 2017	9786024531232

#### H. Pengalaman Editorial Tim/Reviewer Jurnal Internasional

No	Tahun	Nama Jurnal	Penerbit	ISSN/E-ISSN
1.	2018	Journal of Public Administration and Governance [JPAG] <a href="http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/about/editorialTeam">http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/about/editorialTeam</a>	<b>Macrothink Institute</b> 5348 Vegas Dr.#825 Las Vegas, Nevada 89108 United States Phone: 1-702-953-1852 ext. 516 Fax: 1-702-420-2900 Email: jpag@macrothink.org	2161-7104
2.	2018	International Journal of E-Politics [IJEP] <a href="https://www.igi-global.com/journal/international-journal-politics/1147">https://www.igi-global.com/journal/international-journal-politics/1147</a>	<b>IGI Global</b> 701 E. Chocolate Ave. Hershey, PA 17033, USA Phone: 717-533-8845 x100 Toll Free: 1-866-342-6657 Fax: 717-533-8661 or 717-533-7115 E-mail: cust@igi-global.com	1947-9131 1947-914X DOI:10.4018/IJEP
3.	2019	World Journal of Social Science <a href="http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjss/about/editorialTeam">http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjss/about/editorialTeam</a>	Canada Office: 1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ON., M3J3H7, Canada Monica Anderson Editorial Assistant Sciedu Press Phone: 1-310-986-2599 ext. 222 Fax: 1-310-956-0499 Email: wjss@sciedupress.com	(Print) 2329-9347 (Online) 2329-9355

## **I. Pengalaman Perolehan HKI**

No	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis HKI	Status (Terdaftar/No P/ID Grandes)
1.	2018	Berburu Rente Di Pulau Batam. Provinsi Istimewa Singapura, Dan "Negara Bintan".	Buku	EC00201808178, 5 April 2018/ 000104600

Semua data yang dijelaskan dan tercantum dalam Curriculum Vitae [CV] tersebut adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, Saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian CV ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2019



**Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil**